



Evaluasi Kebijakan Rumah Singgah Pasien Pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar

Muharram Aco¹, Djainuddin. M²

¹²Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

acomuharram15@gmail.com

Keywords:
*Evaluation,
Policy,
shelter house*

Kata Kunci:
*Evaluasi,
Kebijakan,
rumah singgah*

ABSTRACT

Muharram Aco, 20043014022, Evaluation of Majene Regency Government's Patient Halfway House Policy in Makassar City. Supervised by Mariati Rahman and Tetty Dwiyaniti. This study aims to determine the evaluation of the Majene Regency government patient shelter policy in Makassar City and to determine the factors of the Majene Regency government patient shelter policy in Makassar City. The type of research used is qualitative. The research informants consisted of the head of the Majene Regency health office, the manager of the Majene Regency government patient shelter in Makassar City, and patients at the Majene Regency government patient shelter in Makassar City. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Data analysis in the form of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion making. The results of the study illustrate that the evaluation of the Majene Regency government's patient halfway house policy is considered effective in terms of place and the usefulness of the patient halfway house policy felt by the Majene community. However, the policy of the Majene Regency government patient shelter in Makassar City if assessed from efficiency and responsiveness of satisfaction is still far from being maximized due to the limitations of the Majene Regency government patient shelter manager in Makassar City.

ABSTRAK

Muharram Aco, 20043014022, Evaluasi Kebijakan Rumah Singgah Pasien Pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar. Dibimbing oleh Mariati Rahman dan Tetty Dwiyaniti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian terdiri dari kepala dinas kesehatan Kabupaten Majene, pengelola rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar, dan pasien di rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene dinilai efektif dari segi tempat dan kebermanfaatan kebijakan rumah singgah pasien yang

* Corresponding Author

Email : acomuharram15@gmail.com

dirasakan masyarakat Majene. Namun kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar jika dinilai dari efisiensi dan responsivitas kepuasan masih jauh dari kata maksimal karena keterbatasan pengelola rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Majene merupakan pemegang kebijakan di daerah yang dimana Kabupaten Majene ini adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi barat. Salah satu yang menjadi kebijakannya yakni pengadaan rumah singgah pasien. Kebijakan ini terlahir dikarenakan dorongan dari masyarakat melihat data jumlah pasien rujukan ke kota Makassar itu cukup tinggi, tercatat kurang lebih pasien rujukan ke kota Makassar hingga 2020 sekitar 550 pasien, barulah di awal tahun 2020 kebijakan rumah singgah pasien ini lahir dan untuk memperkuat kebijakan ini maka dibuatlah regulasi yang mengatur yakni PERBUB MAJENE NO. 13 TAHUN 2022 tentang pedoman penyelenggaraan rumah singgah pasien guna menunjang pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan secara maksimal.

Rumah Singgah Pasien (RSP) Majene merupakan tempat yang disediakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Majene bagi masyarakatnya untuk digunakan sebagai tempat persinggahan atau bagi pasien dan keluarga pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Makassar. Rumah Singgah Pasien tersebut digunakan oleh pasien dan keluarga pasien sampai proses pengobatannya selesai. Rumah Singgah Pasien yang selanjutnya disingkat RSP adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut. Seiring berjalannya kebijakan ini terdapat begitu macam problematika didalamnya, mulai dari pengeleloaan yang belum maksimal hingga sarana dan prasarana yang belum memadai. Tak hanya itu, pengadaan rumah singgah pasien (RSP) Majene yang berada di Kota Makassar ini belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat Majene, karena informasinya hanya diketahui oleh keluarga yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Majene. Berdasarkan data jumlah pasien yang menggunakan fasilitas rumah singgah pasien mulai dari bulan Januari sampai pada bulan September tahun 2023 yaitu sekitar 63 pasien, berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan dengan data rujukan pasien itu hanyalah sebagian kecil dari total pasien yang di rujuk di Kota Makassar. Dari masalah yang terjadi perlu diketahui secara menyeluruh mengapa persoalan diatas terjadi, apakah pengelolaan RSP ini masih jauh dari kata maksimal, atau penginformasian kepada masyarakat Majene secara umum belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang dirujuk ke Kota Makassar belum mengetahui tentang adanya RSP ini, atautkah fasilitas rumah singgah ini belum cukup memadai untuk ditempati oleh pasien rujukan.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive

dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono, 2018). Jumlah informan sebanyak 7 orang yaitu kepala dinas kesehatan (1 orang), pengelola RSP (1 orang), pasien penghuni RSP (5 orang).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar

a. Tempat/lokasi

Dalam sebuah kebijakan yang berbentuk program tempat merupakan bangunan yang disediakan oleh pembuat kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang menjadi target dalam sebuah program. Tentunya tempat ini memiliki standar yang harus dipenuhi sehingga layak untuk ditempati. Wawancara dengan E selaku pasien RSP: “Tempat yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Majene ini sudah sangat membantu kami sebagai warga Majene yang melakukan pengobatan di Makassar karena jaraknya yang begitu dekat dengan rumah sakit”. Adapun hasil dari wawancara dengan seluruh informan dan observasi dari peneliti yang menyimpulkan bahwa untuk standar tempat rumah singgah pasien ini sudah baik, ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Azwar (1996) bahwa dalam sebuah kebijakan yang berbentuk program, tentu ada standar yang harus dipenuhi, dalam hal ini kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene merujuk pada Perbub No. 13 tahun 2022 sebagai landasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene. Dalam Perbub tersebut telah dijelaskan bahwa tempat untuk rumah singgah pasien harus berada dalam radius 2 Km dari rumah sakit rujukan tingkat lanjut. Hasil dari wawancara dengan seluruh informan dan observasi dari peneliti yang menyimpulkan bahwa untuk standar tempat rumah singgah pasien ini sudah baik.

b. Fasilitas

Fasilitas rumah singgah pasien adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Majene sesuai dengan Perbub Majene no.13 tahun 2022. Fasilitas ini diadakan untuk meringankan segala biaya tambahan bagi pasien dan keluarga pendamping pasien selama melakukan pengobatan di rumah sakit tujuan. Fasilitas yang dimaksud seperti rumah sebagai tempat bernaung, sementara, sembako untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga pendamping pasien, serta kebutuhan lainnya seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Wawancara dengan A selaku pasien RSP: “kalau untuk fasilitas memang ada namun banyak yang sudah rusak, seperti kursi roda, dan toilet kamar mandi yang buntu”. Berdasarkan observasi peneliti dan hasil wawancara terhadap seluruh informan, ditemukan fakta bahwa fasilitas yang ada di rumah singgah pasien ada yang sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki. Tak hanya itu, jumlah kamar yang disediakan sebenarnya terbilang masih sangat kekurangan, walaupun sudah sesuai dengan standar yang ada dalam Perbub Majene No. 13 tahun 2022, akan tetapi jumlah pasien yang dirujuk ke Makassar itu terbilang cukup banyak. Data tahun 2021 ada sekitar 311 orang yang dirujuk ke Makassar, kemudian ditahun 2022 ada 954 orang dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 830 orang. Sementara itu untuk pasien yang melakukan rujukan tingkat lanjut di Makassar yang sempat mendiami rumah singgah pasien tercatat pada tahun 2021 sebanyak 80 orang, tahun 2022 sebanyak 78 orang dan

sebanyak 63 orang pada tahun 2023. Kurang memadainya fasilitas RSP itu mengakibatkan pasien yang ingin masuk ke RSP terpaksa dialihkan ke asrama mahasiswa Majene. Dengan membandingkan data di atas bisa dinilai bahwa fasilitas yang telah ada sangat perlu diperhatikan dan ditambah lagi agar masyarakat Majene bisa merasakan dengan baik dampak dari kebijakan rumah singgah pasien ini, mengingat kebijakan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat Majene dan tujuan daripada kebijakan ini untuk memperdekat akses ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut serta meringankan beban masyarakat Majene selama melakukan pengobatan di rumah sakit rujukan tingkat lanjut. Tak hanya itu, akibat daripada fasilitas yang belum memadai dan mencukupi terkadang pasien yang ingin masuk ke rumah singgah pasien biasa ditampung untuk sementara waktu di asrama mahasiswa Majene karena kurangnya fasilitas yang ada di rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa fasilitas yang ada di rumah singgah pasien ada yang sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki. Dari data di atas pun kita bisa menarik kesimpulan jika fasilitas yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Majene masih belum maksimal.

2. Hasil evaluasi kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene

a. Efektif

Artinya menilai kebijakan ini secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini masyarakat Majene sebagai sasaran pengguna rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene. Wawancara dengan J selaku pasien RSP: “rumah singgah pasien ini sangat bermanfaat karena menjadi tempat kami untuk bernaung sementara selama proses pengobatan”. Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, diambil kesimpulan jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini program rumah singgah pasien itu bisa dibilang efektif karena kebijakan ini terbukti secara nyata bahwa program ini berhasil dan itu ditandai dengan kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat Majene yang telah menghuni rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene ini ataupun yang masih menggunakannya. Hal inipun selaras dengan penelitian Titi Setyaningrum (efektifitas program rumah singgah pasien (RSP) di inisiatif zakat Indonesia (IZI) Jawa tengah) dengan hasil penelitian bahwa program rumah singgah pasien itu dinilai sesuai dengan tujuan program, ketepatan sasaran, dan perubahan nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini program rumah singgah pasien itu bisa dibilang efektif karena kebijakan ini terbukti secara nyata bahwa program ini berhasil dan itu ditandai dengan kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat Majene yang telah menghuni rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene ini ataupun yang masih menggunakannya.

b. Efisiensi

Artinya sebanyak apa usaha yang telah dilakukan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang bisa digunakan. Wawancara dengan R selaku kepala dinas Kesehatan: “kalau itu mesti diakui bahwa dalam menjalankan program ini masih belum maksimal hal ini dikarenakan anggaran yang sedikit dan pencairan yang tak bisa langsung diproses ketika dibutuhkan, hal itu

mengakibatkan beberapa kebutuhan pasien yang menghuni rumah singgah pasien kadang tak terpenuhi, namun kami tetap akan mengupayakan yang terbaik buat masyarakat Majene". Hasil dari wawancara dengan seluruh informan dan berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa kebijakan rumah singgah pasien ini sangat membantu masyarakat Majene namun masih jauh dari kata maksimal. Hal ini dikarenakan anggaran rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene yang kurang, belum lagi pencairan anggarannya yang begitu kaku karena harus mengikut dengan aturan bendahara dengan pencairan tiap triwulan sedangkan kebutuhan rumah singgah pasien diperlukan terus setiap bulannya. Hal ini mengakibatkan pengelola rumah singgah pasien terbatas dalam menjalankan program rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Afifah (pengelolaan rumah singgah) dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan yang baik dan maksimal akan terwujud jika perencanaannya matang, pengorganisasian yang baik serta evaluasi yang rutin. Jika kita membandingkan kasus di atas dengan program rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan program tersebut belum matang. Perencanaan yang belum matang pasti akan berdampak pada pengelolaan yang kurang baik, dengan ini menyatakan bahwa evaluasinya pun pasti tidak rutin dilakukan, karena apabila evaluasinya betul rutin dilakukan persoalan di atas setidaknya mampu untuk dicarikan solusi yang baik dan secepat mungkin. Dari beberapa poin di atas maka dapat dinilai bahwa kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene masih belum efisien.

Hasil penelitian menunjukkan jika program ini belum efisien dikarenakan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

c. Responsivitas

Artinya apakah hasil daripada kebijakan ini memuaskan atau tidak. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program rumah singgah pasien ini masih belum cukup memuaskan. Wawancara dengan E selaku pasien RSP: "kebijakan ini sebenarnya bagus namun sayangnya pemerintah masih kurang memperhatikannya sehingga kebijakan ini tidak begitu maksimal". Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program rumah singgah pasien ini masih belum cukup memuaskan. Hal itu bisa kita lihat dengan respon masyarakat terhadap program ini dikarenakan masih sangat banyak hal-hal yang menjadi tolak ukur dari program rumah singgah pasien ini belum terpenuhi. Kalau dilihat dari segi tempatnya kebijakan ini sudah banyak membantu masyarakat Majene karena mendekatkan masyarakat ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut, dan kebijakan ini efektif untuk menangani persoalan masyarakat Majene yang sering dirujuk ke Makassar. Akan tetapi untuk fasilitas yang ada itu belum cukup memadai dan masih sangat kurang sehingga masih jauh dari kata maksimal untuk memuaskan masyarakat Majene yang menggunakan fasilitas rumah singgah pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Majene masih kurang responsif terhadap kebijakan rumah singgah pasien tersebut karena begitu banyak permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat Majene yang menggunakan rumah singgah pasien Kabupaten Majene. Jika ingin mencapai responsivitas yang baik dalam hal ini mengenai

kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene hendaknya pemerintah melakukan evaluasi yang rutin untuk mengukur sejauh mana dampak daripada kebijakan ini kepada masyarakat Majene. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Afifah (pengelolaan rumah singgah pasien) yang menunjukkan jika pengelolaan rumah singgah pasien yang baik akan dapat terwujud jika prosesnya mulai dari perencanaan yang telah matang, pengorganisasian yang baik serta evaluasi yang rutin itu telah dilakukan. Hal inipun selaras dengan teori yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) mengenai hasil evaluasi kebijakan. Dalam teori tersebut untuk mencapai responsivitas yang baik dalam memuaskan masyarakat sebagai sasaran daripada kebijakan ini haruslah bisa kita nilai terlebih dahulu efektifitasnya, kemudian masuk pada tahap efisiensinya, dan jika 2 poin di atas terpenuhi maka akan melahirkan kepuasan terhadap masyarakat dan tentunya hal itu dapat terjadi jika pemerintah/pemegang kebijakan responsif atau cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Faktor penghambat rumah singgah pasien

Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai faktor penghambat dalam program rumah singgah pasien adalah anggaran. Anggaran merupakan persoalan yang fundamental dalam sebuah kebijakan yang berbentuk program. Salah satu fungsi anggaran sebagai penentu rangkaian kegiatan di masa yang akan datang. Hasil wawancara dengan R selaku kepala dinas kesehatan Kabupaten Majene: “dalam menjalankan program ini masih belum maksimal karena terbatas oleh anggaran yang sedikit” Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang baik namun sayangnya belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran yang ada, yang pada dasarnya anggaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjalankan program seperti ini. Hal ini pun sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M.Fuad dkk yang dimana anggaran ini sebagai pedoman untuk menjalankan program dalam satu periode tertentu. Kemudian jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Afifah (pengelolaan rumah singgah) yang dimana ada poin yang harus diperhatikan untuk mencapai pelayanan rumah singgah yang baik seperti perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik serta evaluasi yang rutin, dari sini kita bisa melihat bahwa perencanaan program rumah singgah pasien belum cukup matang serta evaluasinya masih kurang itu ditandai dengan keterbatasan anggaran yang dimana anggaran itu sebagai hal yang fundamental dalam kebijakan ini. Hal ini mengakibatkan pelayanan rumah singgah pasien kurang maksimal.

2. SIMPULAN

- a. Evaluasi kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar jika dinilai dari segi tempat dan fasilitas itu menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat membantu untuk masyarakat Majene yang sedang dalam proses pengobatan tingkat lanjut di rumah sakit rujukan yang berada di kota Makassar. Tempat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar itu sudah sesuai standar dengan kriteria rumah singgah pasien yang ada di Perbup Majene No. 13 tahun 2022. Namun fasilitasnya masih belum cukup memadai di karenakan anggaran yang sedikit. Hal ini mengakibatkan masyarakat Majene dalam hal ini yang dirujuk ke Makassar dan menghuni rumah singgah pasien belum bisa

- merasakan secara maksimal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Majene kepada masyarakat melalui kebijakan tersebut.
- b. Hasil evaluasi kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene di Kota Makassar menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai efektif untuk membantu masyarakat Majene yang sedang melakukan pengobatan tingkat lanjut di rumah sakit rujukan. Namun meskipun dinilai efektif nyatanya kebijakan ini belum dapat dikatakan efisien pula karena pemerintah Kabupaten Majene terkendala oleh anggaran yang sedikit sehingga pemerintah terbatas melakukan sesuatu untuk dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Majene. Kemudian jika melihat dari responsif kepuasan masyarakat dari kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene ini masih kurang memuaskan karena begitu banyak aspek yang belum dapat terpenuhi secara maksimal seperti kapasitas rumah singgah pasien yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai serta butuhnya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut.
 - c. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene sehingga menjadi kendala untuk memaksimalkan program rumah singgah pasien. Faktor anggaran menjadi kendala yang paling mendasar mengapa kebijakan ini belum bisa dikelola secara maksimal, ditambah proses pencairan anggaran tersebut yang terlalu ribet sehingga anggaran tersebut tidak bisa langsung digunakan saat itu juga ketika dibutuhkan untuk pengelolaan rumah singgah pasien.

Ucapan Terimah Kasih*

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengukur kebijakan rumah singgah pasien pemerintah Kabupaten Majene, mengingat kebijakan ini berdampak besar bagi masyarakat Majene yang sedang melakukan pengobatan Tingkat lanjut di Makassar.

REFERENSI

- Dunn, William N, 2003. Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan), edisi kedua, Jogyakarta, Gajahmada University Pres.
- Hasibuan, A.F. 2022 Perencanaan Program Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang
- Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Parsons, Wayne. 2011. Public Policy; pengantar teori dan praktik analisis kebijakan , Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, Mariati, 2017. Ilmu Administrasi, CV Sah Media, Makassar
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Titi, Setyaningrum, 2019, Efektivitas program rumah singgah pasien (rsp) di inisiatif zakat indonesia (izi) provinsi jawa tengah